

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Pulau Punjung, Mei 2015

Tenggarong, Juni 2018

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PERANGKAT DAERAH, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PERANGKAT DAERAH memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Renja 2019 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Draft Renstra 2016-2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang harus terintegrasi dengan prioritas dan focus pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ini memuat usulan-usulan kegiatan tahun 2019 dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi rancangan Renja PERANGKAT DAERAH didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2019.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu penentuan kegiatan 2019 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi 2017 dan evaluasi tahun 2016. Usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilah ke dalam beberapa *skala prioritas* yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pertanahan dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Bupati No.21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tata cara enyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Bupati Kab.Kutai Kartenegro No.29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartenegro Tahun 2014;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartenegro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartenegro Tahun 2016 – 2021 Tanggal 16 Agustus 2016;
- j. Surat Edaran Nomor :050.13/173/BAPP-V.I/III/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2019.

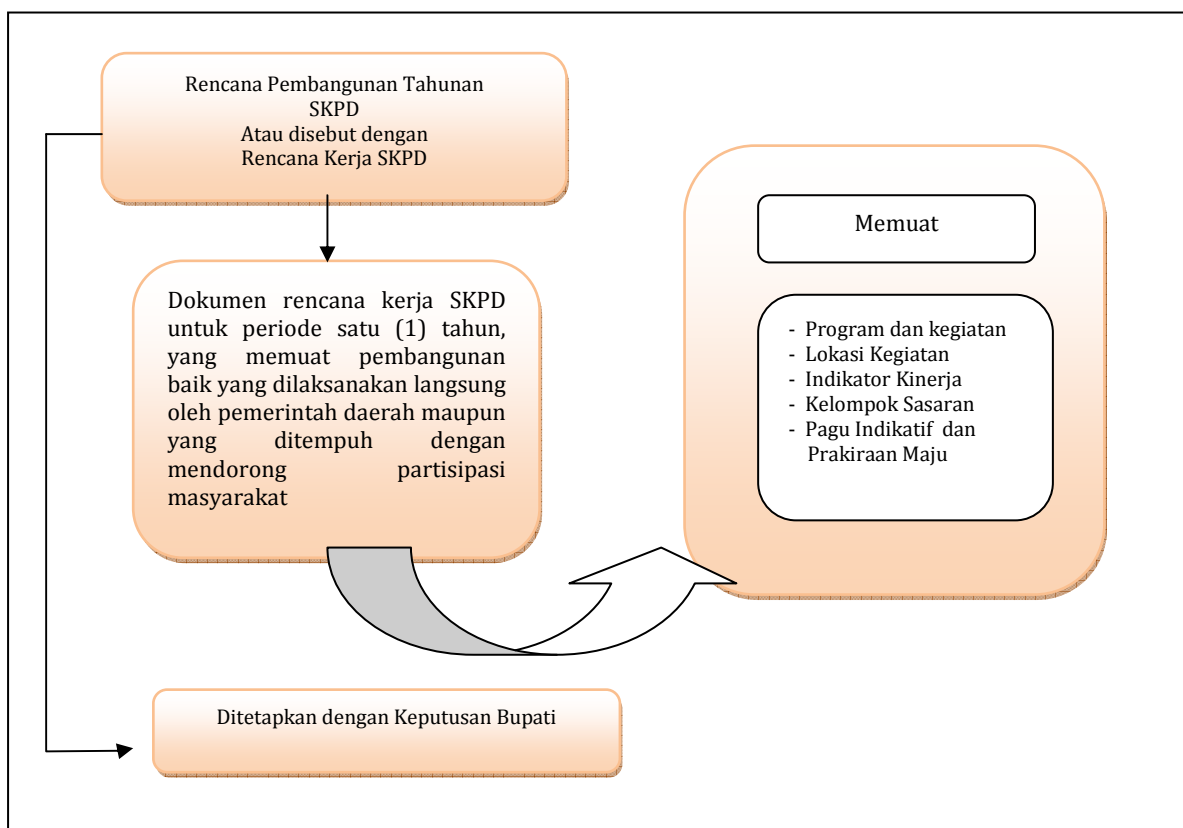
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja dari Dinas Pertanahan dan Penataan ruang Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan melibatkan Stakeholders Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja. Gambaran tentang Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, ditunjukkan pada gambar 1.1.



Sedangkan Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara mengaju kepada Permendagri No.54 Tahun 2010, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PERANGKAT DAERAH agar Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PERANGKAT DAERAH, proses penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH, keterkaitan antara Renja PERANGKAT

DAERAH dengan dokumen RKPD, Renstra PERANGKAT DAERAH, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Renja PERANGKAT DAERAH, proses penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH, keterkaitan antara Renja PERANGKAT DAERAH dengan dokumen RKPD, Renstra PERANGKAT DAERAH, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja PERANGKAT DAERAH.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PERANGKAT DAERAH, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam hal ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana tahun pertama pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Selama kurun waktu tahun 2017 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan 3 (tiga) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dalam Pagu Murni APBD 2017.

Untuk melaksanakan keseluruhan Program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp 1.459.536.214,02 yang kemudian mengalami Rasionalisasi Anggaran dan pada APBD Perubahan total Anggaran APBD-P menjadi Rp 1.552.798.839,38 yang dilaksanakan melalui 4 (Empat) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan.

Dari keseluruhan Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, anggaran yang mampu direalisasikan sekitar 84,85 % atau senilai Rp 1.239.741.076,00 dengan capaian Realisasi Fisik sebesar 85,33 %.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari target Renstra dan Renja 2017, menunjukkan realisasi kinerja sebesar 41,88 % dari target makanan dan minuman sebanyak 191 kotak hanya terealisasi sebesar 82 kotak selama tahun 2017.
 - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan Ke Luar Daerah, dari target Renstra dan Renja 2017, menunjukkan realisasi kinerja sebesar 9,83% dari target koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah yang direncanakan sebanyak 61 orang hanya dapat dilaksanakan oleh 6 orang selama tahun 2017.
2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - a. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal, dari target Renstra dan Renja 2017, tidak ada realisasi untuk kegiatan ini dari target keluaran sebanyak 1 paket.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dari target Renstra dan Renja 2017 sebanyak 60 rekening, yang terdiri dari rekening Listrik selama 12 bulan, rekening air 12 bulan, rekening Telepon dan Internet selama 12 bulan, dan rekening belanja kawat/faksimili/dan Tv Kabel selama 12 bulan. Total realisasi selama tahun 2017 sebanyak 100%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dari target Renstra dan Renja 2017 sebanyak 4 orang, terealisasi 100 % yaitu berupa honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari target Renstra dan Renja 2017 sebanyak 1 paket pengadaan alat tulis kantor dapat terealisasi 100%.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran, dari target Renstra dan Renja PD 2017 sebanyak 660 OB ddapat terealisasi 1005 selama Tahun Anggaran 2017.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari belanja penggantian suku cadang dan belanja perawatan kendaraan bermotor, dari target renstra dan renja 2017 sebanyak 4 unit kendaraan dapat direalisasikan 100%.
3. Program Perencanaan Tata Ruang.
 - a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Substansi Raperda RTRW Kab.Kutai Kartanegara.
Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Substansi Raperda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, merupaka kkegiatan tunggal yang ada di program perencanaan Tata Ruang, dari target Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dengan target capaiak keluaran sebanyak 1 Dokumen Revisi RTRW dapat direalisasikan 100%. Walaupun secara realisasi keuangan tidak terpenuhi 100%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari target Renstra dan Renja 2017 sebanyak 3 jenis barang cetakan dan 1 paket penggandaan dapat direalisasikan sebanyak 5 jenis barang cetakan dan 1 paket penggandaan. Capaian realisasi keluaran sebesar 167% selama tahun 2017.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

2.1.4.1 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan, yaitu :

1. Kesalahan dalam menentukan target keluaran;
2. Adanya pengurangan penganggaran dari Tim TAPD dikarenakan defisitnya anggaran APBD;
3. Tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD), sehingga pelaksanaan kegiatan yang memerlukan pembiayaan menjadi tidak terealisasi.

2.1.4.2 Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

1. Penyusunan target Renja kegiatan sesuai dengan target Renstra;
2. Kesesuaian penentuan indikator target kinerja;
3. Waktu dan penganggaran kegiatan yang mencukupi.

2.1.4.3 Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Karena banyaknya kebutuhan kantor untuk mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja melebihi rencana strategic;
2. Target yang ditetapkan di awal renstra lebih rendah dari pada capaian, karena dari segi keuangan mencukupi, maka anggaran yang ada dimaksimalkan penggunaannya.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Dengan tercapainya program perencanaan Tata Ruang berupa fasilitasi dan Koordinasi Substansi Raperda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperoleh beberapa hal yaitu :
 - a. Tersusunnya rekomendasi peninjauan kembali rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Tersusunnya kajian pengaruh kebijakan, rencana dan program dalam rancangan RTRW terhadap isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Tersusunnya Rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rancangan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Terlaksananya proses persetujuan substansi Raperda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara

2.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya juga melakukan pendekatan kepentingan dan analisis kebutuhan berdasarkan prioritas daerah, bukan hanya melihat dari pendekatan anggaran;
2. Kegiatan yang menjadi Prioritas setiap Perangkat Daerah agar diakomodir sehingga seluruh elemen pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik;
3. Dalam proses perencanaan penganggaran, TAPD hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan pentingnya beberapa dokumen awal dalam perencanaan pembangunan, seperti dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
	Urusan	Formula
1	PERTANAHAN	
	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100\%$
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$
	Penyelesaian izin lokasi	$\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Permohonan Izin Lokasi}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
	Bagian	Formula
2.	PENATAAN RUANG	
	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\%$
	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luasan RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$
	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100\%$
	Ruang public yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah ruang public yang berubah fungsi (Ha)}}{\text{Jumlah Ruang Publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$
	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara}}{\text{Luas daratan}} \times 100\%$
	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realiasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100\%$

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD

tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak terbentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas embantuan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

b. Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tidak memberikan pelayanan secara langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah). Namun Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tetap melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis.
2. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah;
3. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan.
4. Optimalisasi penataan dan pemanfaatan tata ruang seperti Kawasan kumuh yang berada pada pinggiran sungai dan pinggiran laut serta Penetapan kawasan khusus (Zona Pengelolaan) yang menjadi Embrio kawasan terpadu sesuai potensi daerah;
5. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
6. Belum semua wilayah kecamatan memiliki dokumen perencanaan;
7. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
8. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;

9. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa kecamatan/desa dan ex HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;
10. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;
11. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari TAPD dikarenakan difisitnya anggaran APBD Kutai Kartanegara;
12. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;
13. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa desa dan ex. HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berpegang pada Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat dan disepakati, yaitu sebagai berikut :

1. Visi

“ Mewujudkan terselenggaranya urusan Pertanahan dan Penataan Ruang untuk mendukung Pembangunan Kutai Kartanegara yang berkelanjutan”

2. Misi

- Meningkatkan penyelenggaraan urusan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang di Daerah.
- Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
- Meningkatkan fasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan dan kepentingan umum lainnya.
- Meningkatkan tertib administrasi penguasaan/penggunaan tanah.
- Meningkatkan kapasitas penyelesaian sengketa pertanahan.
- Menyebarkan pemahaman ketentuan di bidang pertanahan dan tata ruang.
- Meningkatkan pengendalian penggunaan tanah bagi pembangunan dan investasi.
- Menyediakan peta penggunaan tanah dan penataan ruang.
- Peningkatan dan penguasaan hak atas tanah masyarakat.
- Mengembangkan data/informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang berbasis teknologi informatika.
- Meningkatkan sumber daya manusia di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan Misi Ke Lima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah” , yang tujuannya untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya interkoneksi antar wilayah; dengan indikator:
 - Persentase Jalan dengan Kondisi Baik
- b. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan; dengan indikator:
 - Cakupan aksesibilitas antar wilayah
- c. Terwujudnya koneksi jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city; dengan indikator:
 - Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/Desa/Kelurahan
 - Jumlah Kawasan Berbasis IT
- d. Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dengan indikator:
 - Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh
 - Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga

2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan
2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Pertanahan dan penataan ruang.
3. Penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan agar segala sesuatu yang ada didalamnya bisa lebih terstruktur dan teratur. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan melalui Peraturan daerah nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033. Namun demikian RTRW ini masih bersifat umum dan memerlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang secara spesifik akan mengatur pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta zonasinya. Sampai dengan saat ini belum ada RDTR yang ditetapkan padahal RTRW telah ditetapkan sejak 3 (tiga) tahun silam sehingga pemanfaatan ruang yang dilaksanakan hingga saat ini bisa saja berbeda dengan pemanfaatan ruang yang seharusnya. Sementara itu, perkembangan pembangunan di Wilayah Kutai Kartanegara berjalan dengan cepat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyusunan RDTR tidaklah mudah, baik dari proses penyusunan maupun pembiayaan, namun komitmen tinggi untuk mewujudkannya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. RDTR memegang peranan penting untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh melemahnya daya dukung lingkungan sehingga tidaklah mungkin jika RDTR disusun dengan menyesuaikan pemanfaatan ruang yang telah ada saat ini. Belum adanya RDTR menjadikan RTRW sebagai satu-satunya pegangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, baik untuk

keperluan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. RTRW yang telah disusun harus konsisten diterapkan sembari menunggu penyelesaian dan penetapan RDTR melalui Perda.

5. Luas dan Aksesibilitas Wilayah Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kutai Timur. Luas wilayah Kutai Kartanegara mencapai 2.571.641 ha (27.263,1 km²) yang secara administrative terbagi menjadi 18 kecamatan dan terbentang dari daerah hulu sampai daerah muara (pesisir laut Jawa). Kawasan hutan memiliki luasan lebih dari 40 % terhadap luas wilayah Kutai Kartanegara. Sementara pemanfaatan untuk permukiman masih dibawah 1 % (BPS, 2013). Seluruh wilayah Kutai Kartanegara belum terkoneksi melalui jalur darat bahkan sebagian yang telah terkoneksi pun kondisi jalannya rusak. Sebagian wilayah, terutama di daerah Hulu, baru bisa diakses dengan jalur sungai dengan biaya transportasi yang tidak murah sehingga menyebabkan indeks kemahalan konstruksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Masih rendahnya sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah;
2. Belum dimilikinya dokumen perencanaan Tata Ruang yang baik;
3. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing Desa/Kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;
5. Banyaknya persoalan-persolan sengketa pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terselesaikan baik yang dikuasai oleh masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Untuk tahun anggaran 2019 terdapat kegiatan yang merupakan jaring aspirasi , yaitu :

1. Permohonan Fasilitas Sengketa Lahan Pemukiman yang berlokasi di Desa Muara Ritan Tabang menjadi jaring aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019, terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DDAERAH

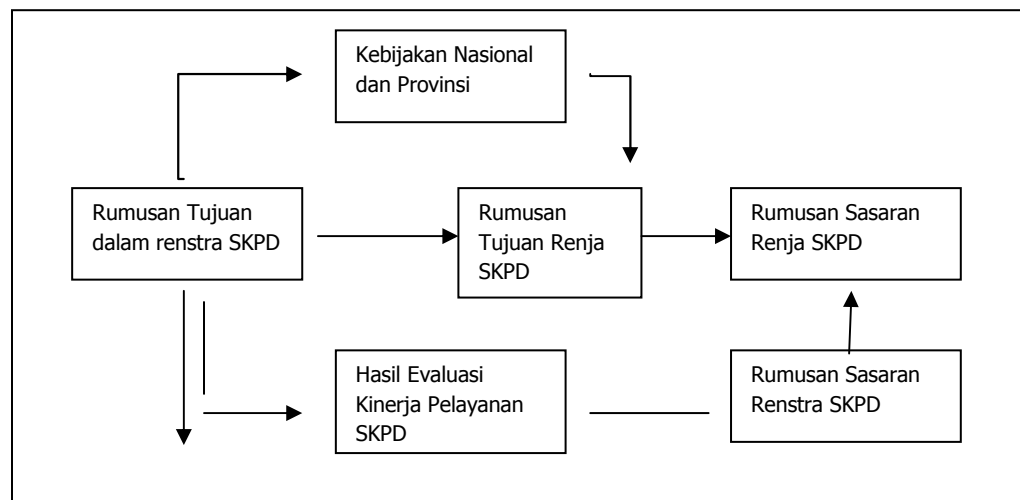
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam tabel 3.1. terlampir.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:



Dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga memiliki tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan asministrasi di bidang pertanahan;
2. Menyelesaikan sengketa pertanahan

3. Mengatur dan melaksanakan penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah, secara tertib dan berkeadilan sesuai tata ruang;
4. Menyediakan informasi yang akurat bagi pemerintah dan masyarakat;
5. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkuantitas guna pelayanan yang prima;
2. Menegakkan hukum pertanahan yang konsisten;
3. Meningkatkan tata tertib administrasi hukum, penggunaan tanah dan pemeliharaan lingkungan;
4. Pemanfaatan tanah secara optimal dan lestari;
5. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, yaitu :

1. Penerapan tertib administrasi pertanahan;
2. Pengembangan pemanfaatan ruang, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung/rumah dinas, pembinaan jasa konstruksi, pengendalian pemanfaatan ruang, revitalisasi kawasan, operasi dan pemeliharannya bangunan gedung/rumah dinas dengan mengacu standarisasi keamanan dan keselamatan bangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan PD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	2019		2020	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
				Pengadaan Mabeleur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan data dan Informasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan data dan Informasi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara
		Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II		Identifikasi Tata Guna Tanah
				kompilasi Peta Sebaran Izin dengan Peta Hak Atas Tanah Perkebunan dan Industri (HGU, HGB)
				Kegiatan Fasilitasi IP4T (Identifikasi Penguasaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah)
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
		Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai	Program Perencanaan Tata Ruang	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai

		Kartanegara		Kartanegara
		Penyusunan RDTR IKK Kecamatan		Penyusunan RDTR Kawasan Delta Mahakam
				Penyusunan RTR Strategis Kawasan Kekembangan (Kenohan, Kembang Janggut, Tabang)
				Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Loa Kulu
				Lanjutan Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Tenggarong
				Lanjutan Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Tenggarong Seberang
				Penyusunan KLHS RDTR IKK Kecamatan Tenggarong
				Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Loa Kulu
				Penyusunan KLHS RDTR IKK Kecamatan Tenggarong Seberang
			Program Pemanfaatan Ruang	Pengadaan Penunjang Sistem Perpetaan dan Koreksi Lapangan
				Identifikasi Ijin Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan dan Penetapan Garis Sepadan Jalan, Garis Sepadan Bangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
				Identifikasi Ijin Pemanfaatan dan pelanggaran Tata Ruang
				Kajian Insentif dan Disinsentif Terhadap Ketentuan Tata Bangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan PD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Mengamati kondisi deficit keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dirasa perlu setiap Perangkat Daerah untuk merumuskan beberapa program dan kegiatan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan.

Untuk tahun 2019 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas yang dirincikan kedalam 6 Program dan 17 Kegiatan Dari 10 Program dan 221 kegiatan yang tertuang dalam Renstra.

Berikut ini penjelasan beberapa kegiatan Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 yang kami bagi menjadi program Generik dan Non Generik.

A. Program Generik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.

Adapun sifat dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana. Berdasarkan draft Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017 sd 2021 , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari 15 Kegiatan, namun untuk Tahun 2019 prioritas kegiatan yang dilaksanakann dalam program ini sebanyak 8 kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyedia Alat Tulis Kantor;
- d. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan;

- e. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- f. Penyedia Makanan dan Minuman;
- g. Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran;
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun tolak ukur atau indikator keberhasilan dari program ini adalah tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang disusun dan dilaporkan tiap tahunnya oleh Kepala Perangkat Daerah.

Adapun untuk Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan prioritas yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan Data dan Informasi;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi.

B. PROGRAM NON GENERIK

Untuk program non generik urusan pemerintahan wajib pertanahan beberapa program yang menjadi prioritas tahun 2019 kami urutkan berdasarkan yang paling prioritas sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran tanah

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah merupakan program yang dikhususkan dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dijamin oleh Undang-undang.

Dalam kegiatan Pembinaan dan Pengendalian administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan ini dilakukan untuk menertibkan surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dan menertibkan pembayaran PBB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- a. Pembinaan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Dalam program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang menginventarisir data-data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atas bidang-bidang tanah dalam suatu wilayah tertentu.

Adapun dalam program ini kegiatan sertifikasi aset pemerintah menjadi fokus prioritas karena berkaitan dengan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD).

Sertifikasi aset pemerintah pada Kabupaten Kutai Kartanegara ini perlu segera dilakukan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), dimana dalam ketentuan ini disebutkan bahwa BMN berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Badan Pertanahan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 120 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan.

Berikut kegiatan yang tertuang dalam program yang dimaksud :

- a. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II

3. Program Perencanaan Tata Ruang

Dalam program perencanaan tata ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang menjadi salah satu prioritas. Rencana Detail Tata Ruang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah kabupaten/kota dan antar sektor. Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Tata ruang, setiap RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota yang perlu di susun RDTR nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota.

Berikut beberapa hal penting, mengapa Rencana Detail Tata Ruang perlu segera direalisasikan pelaksanaannya ;

- a. Merupakan amanat Undang-undang , dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya adalah untuk memperkokoh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah;
- b. Menjadikan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh dengan perencanaan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat menuju sustainable city/berkelanjutan;
- c. Meminimalisir kegagalan rencana tata ruang dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan.

- d. Sebagai dasar hukum/acuan dalam mengeluarkan izin tentang pemanfaatan lokasi.

4. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Program ini juga menjadi penting untuk dilaksanakan, selain karena menjadi salah satu Indikator kunci dalam pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu kegiatan ini juga lah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Seperti kita ketahui berapa banyak kasus-kasus atau sengketa pertanahan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dan masuk kedalam ranah hukum. Untuk itu Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang telah memiliki tupoksi dalam penyelesaian konflik pertanahan ini menjadikan kegiatan ini penting untuk dilaksanakan dalam Tiap tahun Rencana Kerja.

Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020 adalah sebagai berikut, adapun rumusan rancangan program kegiatan beserta rencana pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel 4.1 :

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Dalam rancangan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegera tahun 2019, ada beberapa fokus bidang yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai salah satu perangkat Daerah penunjang berusaha untuk melaksanakan arah kebijakan yang dimaksud. Adapun beberapa program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi misi dan menjadi prioritas Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8 kegiatan total target penyelesaain 100 % Pagu **Rp 912.980.520,00**
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 kegiatan dengan terget total pagu **Rp 140.349.985,00**
3. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah dengan 1 kegiatan prioritas dengan target 6 kecamatan total pagu **Rp 141.744.015,00**
4. Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan dua kegiatan prioritas Pagu Rp 5.700.000.000,- dengan target capaian 8,7 %
5. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hutan, dengan target 3 kecamatan (Loa Janan, muara Kaman, dan samboja), pagu indikatif Rp 150.000.000,00;
 - Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp 175.000.000,00 termasuk didalamnya kegiatan yang berasal dari aspirasi pememangku kepentingan mengenai penyelesaian sengketa lahan pemukiman di Desa Muara Ritan (Kecamatan Tabang).
6. Program Perencanaan Tata Ruang dengan dua kegiatan prioritas total pagu Rp 800.000.000,00.

Seluruh kegiatan yang direncanakan ini mulai dianggarkan semenjak tahun 2017, namun karena defisit anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain melalui anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa upaya telah dilakukan antara lain dengan mengajukan usulan untuk beberapa kegiatan yang dimaksud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN Pusat, DAK, Bankeu dan APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Memahami posisi dan kondisi keuangan pada Kabupaten Kutai kartenegara pada saat ini yang diikuit dengan tren yang sama ditahun-tahun berikutnya, maka ada beberapa hal yang perlu

disampaikan dan menjadi perhatian bersama jika kegiatan-kegiatan ini tidak ditunjang dengan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, diantaranya sebagai berikut ;

1. Tidak menghilangkan kegiatan, namun kami selaku Dinas Pengelola akan menurunkan target capaian sehingga dana lebih di minimalisir.
2. Agar menjadi perhatian bersama untuk kegiatan yang akan berdampak pada pemasukan PAD.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Semoga Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Tenggarong

Tanggal : April 2018

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Drs.H.Muhammad Syaifuddin

Pembina Utama Muda / IV C

NIP.19590808 199301 1 004

**PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019**

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran	100 Persen			912,980,520	1,625,344,220	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah rekening air, listrik dan telepon, internet, TV kabel yang terbayarkan	60 Rekening	157,200,000	232,120,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	55 OB	47,398,250	300,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah Alat Tulis Kantor	56 Jenis	50,000,000	173,640,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 dan 32.500 Jenis dan Lembar	10,965,550	111,360,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	5 Jenis	500,000	30,925,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	100 dan 6 Kotak dan Jenis	6,000,000	36,382,500	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah Tenaga Honorer Tersedia	660 OB	590,916,720	590,916,720	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	6 Kali	50,000,000	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Tingkat akuntabilitas kinerja	B LKjIP			140,349,985	250,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Pengembangan data dan informasi	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			1. Jumlah Data Bidang	4 Bidang	70,349,985	100,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD yang dihasilkan	6 Dokumen	70,000,000	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PERTANAHAN								DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Cakupan Tertib Administrasi Penguasaan Tanah	6/18 kecamatan 80/237 kel/desa			141,744,015	485,100,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1. Sanga-sanga 2. Marangkayu 3. Muara Badak 4. Anggana 5. Samboja 6. Muara Jawa			Jumlah SKPT Yang Diterbitkan	546 SKPT	141,744,015	485,100,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Luas lahan aset daerah bersertifikat	8,70 Persen			5,700,000,000	300,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah Sertifikat Aset Pemda yang diproses	10 Sertifikat	200,000,000	300,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II	Tenggarong			Jumlah Lahan Yang dibebaskan	3,5 Ha	5,500,000,000		
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase penyelesaian kasus tanah	75 Persen			250,000,000	322,550,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Loa Janan dan muara Kaman			Jumlah kecamatan yang terfasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	2 Kecamatan	150,000,000	80,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Kabupaten Kutai Kartanegara			Jumlah kasus yang diselesaikan	14 Kasus	100,000,000	242,550,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Pemukiman	Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang			Jumlah Kasus yang terselesaikan	1 kasus	-	-	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Program Perencanaan Tata Ruang		1. Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang yang disusun	2 Dokumen			800,000,000	2,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			2. Tersediannya Dokumen RTRW dan Perda Tata Ruang	ada					
			3. Persentase Kecamatan Yang Memiliki RDTR	11,1 % (2/18)					
	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Revisi Perda RTRW Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200,000,000		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan RDTR IKK Kecamatan	Loa Kulu dan Tenggarong			Dokumen Substansi Perda RDTR Tenggarong dan loa kulu	2 Dokumen	600,000,000	2,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH						7,945,074,520	4,982,994,220	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN :

- 1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah SD Tahun 2018**
- 2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara**
- 3. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**
- 4. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019**
- 5. Tabel 3.2 Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Tahun 2019**

Tabel 2.1 (T-C.29)
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN 2018
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan SD tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan kegiatan (renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)	
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
		BIDANG URUSAN PERTANAHAN									
1	09	1	20	3	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon, internet,TV kabel terbayarkan selama 12 bulan (rekening)	300 Rekening	0 0	60 Rekening	60 Rekenign	100	60 Rekening	75 Rekening	25
		Penyediaan bahan bakar genset dan suku cadang	Jumlah biaya bahan bakar genset dan suku cadang selama 12 bulan (Paket)	5 Paket	0 0	1 paket	0 paket	-	1 Paket	0 Paket	0
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan (Bulan)	3300 OB	0 0	660 OB	4 OB	0.61	360 OB	70 OB	2.121212
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (Paket)	1 Paket	0 0	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	1 Paket	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasiona	150 Unit	0 0	30 Unit	0 0	-	21 unit	0 unit	0
		Pengadaan Peralatan Taman	Jumlah pengadaan peralatan taman	25 Jenis	0 0	5 Jenis	0 Jenis	-	5 Jenis	0 Jenis	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5,568,000 lembar	0 0	111,360 lembar	1 Paket	0.00	65000 Lembar	1 Paket	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	500 Buah	0 0	100 Buah	0 Buah	-	18 Jenis	0 Jenis	0
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Pekerjaan	Jumlah peralatan pekerjaan	1 Paket	0 0	1 Paket	0 Paket	-	0 0	0 0	0

							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	425	Buah	0	0	85	Buah	0	Buah	-	85	Buah	0	Buah	0	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	48000	Kotak	0	0	16000	Kotak	191	Kotak	1.19	250	kotak	100	kotak	0.208333	
							Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer Tersedia	3300	OB	0	0	660	OB	660	OB	100.00	660	OB	660	OB	20	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang tersedia	1	Paket	0	0	1	Paket	0	Paket	-	1	Paket	0	Paket	0	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Peralatan Kantor	40	Jenis	0	0	8	Jenis	0	Jenis	-	7	Jenis	0	Jenis	0	
1							Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur yang melakukan Perjalanan Dinas	258	kali	11	kali	13	kali	4	kali	30.77	50	kali	12	kali	4.651163	
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	150	Unit	0	Unit	30	Unit	4	Unit	13.33		Unit		Unit	0	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1	Paket	0	Paket	1	Paket	0	Paket	-	1	Paket	0	Paket	0	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	100	Unit	0	Unit	20	Unit	0	Unit	-	20	Unit	0	Unit	0	
							Pengadaan Mabeleur	Jumlah Mebeleur	42	Jenis	0	Jenis	10	Jenis	0	Jenis	-	8	Jenis	0	Jenis	0	
1							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
1	09	1	20	3	05	11	Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Peserta bimbingan teknis pertanahan dan penataan ruang	25	Orang		-	Orang	5	Orang	0.00	0	Orang	0	Orang	0		
1	09	1	20	15			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															#DIV/0!	
1	09	1	20	15			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	75	Laporan	0	Laporan	6	Laporan	5	Laporan	83.333333		Laporan		Laporan	0	
1	09	1	20	15			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	30	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0		Laporan		Laporan	0	
1	09	1	20	15			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100	
							Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	cakupan tata tertib administrasi															
							Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah SKPT Yang Diterbitkan	5460	SKPT		-	SKPT	0	SKPT	0	SKPT	0	564	SKPT	546	SKPT	10

						Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Sertifikat	25	Sertifikat	0	Sertifikat	5	Sertifikat	0	Sertifikat	0	5	Sertifikat	0	Sertifikat	0
						Fasilitasi Sertifikat Tanah Masyarakat (PRODA)	Jumlah Bidang Tanah	500	Bidang	0	Bidang	100	Bidang	0	Bidang	0	100	Bidang	0	Bidang	0
						Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah	60	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0
						Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian	Jumlah Bidang	60	Bidang	0	Bidang	0	Bidang	0	Bidang	0	60	Bidang	0	Bidang	0
						Penataan Data-data dan dokumen pertanahan	Jumlah Dokumen yang tertata	155	Dokumen	0	Dokumen	50	Dokumen	0	Dokumen	0	50	Dokumen	0	Dokumen	0
						Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi dan Izin Penetapan Lokasi	Jumlah Pertimbangan Teknis Yang Dikeluarkan	100	Pertek	0	Pertek	20	Pertek	10	Pertek	0	10	Pertek	0	Pertek	0
						Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis (Pra Sertifikasi)	Kelengkapan Berkas Sertifikat	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0
						Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	persentase luas lahan bersertifikat														
						Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah	Jumlah Persetujuan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan	150	PPT	0	PPT	0	PPT	0	PPT	0	30	PPT	0	PPT	0.00
						Identifikasi Tata Guna Tanah	Jumlah Kecamatan yang diidentifikasi	10	Kecamatan	0	Kecamatan	2	Kecamatan	0	Kecamatan	0.00	2	Kecamatan	0	Kecamatan	0.00
						kompilasi Peta Sebaran Izin dengan Peta Hak Atas Tanah Perkebunan dan Industri (HGU, HGB)	Tersedianya data kompilasi Peta Sebaran Izin dengan Hak Atas Tanah Perkebunan dan Industri (HGU,HGB)	60	Peta Kompilasi	0	Peta Kompilasi	12	Peta Kompilasi	0	Peta Kompilasi	0.00	24	Peta Kompilasi	0	Peta Kompilasi	0.00
						Kegiatan Fasilitasi IP4T (Identifikasi Penguasaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah)	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi IP4T	90	Kecamatan	0	Kecamatan	18	Kecamatan	0	Kecamatan	0.00	36	Kecamatan	0	Kecamatan	0.00
						Fasilitasi Konsolidasi Lahan	Jumlah Bidang yang dikonsolidasi	100	Bidang	0	Bidang	20	Bidang	0	Bidang	0.00	40	Bidang	0	Bidang	0.00
						Kompilasi Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	Jumlah Kecamatan yang memiliki Kompilasi peta penggunaan dan pemanfaatan lahan	90	Kecamatan	0	Kecamatan	18	Kecamatan	0	Kecamatan	0.00	18	Kecamatan	0	Kecamatan	0.00
						Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	persentase penyelesaian kasus pertanahan														
						Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah kasus yang diselesaikan	175	Kasus	0	Kasus	35	Kasus	14	Kasus	40.00	10	Kasus	10	Kasus	100.00

							Fasilitasi Penyuluhan Administrasi Hukum Pertanahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan penyuluhan administrasi hukum Pertanahan	36	Kecamatan	0	Kecamatan	18	Kecamatan	5	Kecamatan	27.78	13	Kecamatan	0	Kecamatan		
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																
							Penyusunan Kajian Pandangan Suatu Masalah Pertanahan	Jumlah kajian yang dilakukan	1	Paket	0	Paket	1	Paket	0	Paket	0.00	1	Paket	0	Paket		
							Penyusunan Draft Regulasi Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Draft Regulasi yang dikeluarkan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00	1	Dokumen	0	Dokumen		
							Program Perencanaan Tata Ruang																
							Fasilitasi dan Koordinasi Substansi Raperda RTRW Kab.Kutai Kartanegara	Terlaksananya Penyusunan Perda Revisi RTRW Kab.Kutai Kartanegara	1	Dokumen	0	Dok	1	Dok	1	Dok	100.00	0	0	0	0	0.00	
								Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0.00	1	Dok	1	Dok	100.00	
							Penyusunan Materi Teknik RDTR Kec. Loa Kulu	Jumlah materi teknis rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan loa kulu	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0.00	1	Dok		Dokumen		
							Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Anggana	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Anggana yang disusun	1	Dok		Dok		Dok		Dok	0.00	1	Dok		Dok		
							Sosialisasi Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi penataan ruang	1	kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan	0.00	1	kegiatan		kegiatan		
							Pembangunan sarana informasi publik tata ruang	Tersedianya akses informasi publik	1	paket		paket		paket		paket	0.00	1	paket		paket		
							Pembuatan Peta Dasar	Terlaksananya pembuatan peta dasar	1	paket		paket		paket		paket	0.00	1	paket		paket		
							Koreksi Perpetaan 10 BWP RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara	Terlaksananya koreksi perpetaan RDTR sesuai ketentuan perpetaan yang dikeluarkan oleh Big 1 Dokumen	1	paket		paket		paket		paket	0.00	1	paket				
							Koreksi Perpetaan RDTR Kota Bangun	Terlaksananya koreksi perpetaan RDTR sesuai ketentuan perpetaan yang dikeluarkan oleh Big 1 Dokumen	1	paket		paket		paket		paket	0.00	1	paket				

						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Muara Badak	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Muara Badak dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Muara Jawa	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Muara Jawa dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Samboja	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Samboja dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Sanga-sanga	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Sangasanga dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Anggana	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Anggana dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Marangkayu	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Marangkayu dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Tabang	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Tabang dari BKPRN	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Bangun	Tersusunnya materi KLHS RDTR Kota Bangun	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Muara Wis	tersusunnya materi KLHS RDTR Muara Wis	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Muara Muntai	Tersusunnya materi KLHS RDTR Muara Muntai	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kenohan	Tersusunnya materi KLHS RDTR Kenohan	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kembang Janggut	Tersusunnya materi KLHS RDTR Kembang Janggut	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Sebulu	Tersusunnya materi KLHS RDTR Sebulu	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Muara Kaman	Tersusunnya materi KLHS RDTR Muara Kaman	1	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	1	Dok			
						Pembuatan Peta Desa	Tersusunnya peta desa	4	Dok	Dok	Dok	Dok	0.00	4	Dok			
						Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan RDTR											
						Pengadaan Penunjang Sistem Perpetaan dan Koreksi Lapangan	Tersedianya peta pendukung terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang	1	Dok	- Dok	1	Dok	- Dok	0.00	1	Dok	- Dok	

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisa
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	
1	Luas Lahan bersertifikat			100%	100%	100%	100%	100%	50.22%	8.70%	0%	
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara			100%	100%	100%	100%	100%	85.70%	64.29%	0%	
3	Penyelesaian izin lokasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
4	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			0	100%	0	0	100%	0	8.58%	0%	
5	Keberadaan Perda IMB			0	100%	0	0	100%	0	ada	0%	
6	Rasio Rumah ber IMB			0	100%	0	0	100%	0	0	0%	
7	Keberadaan Perda RTRW (kesesuaian pemanfaatan Tata Ruang)			100%	100%	100%	100%	100%	98.50%	ada	0%	

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran	100 Persen	1,529,477,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran	100 Persen	912,980,520	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon, internet,TV kabel yang terbayarkan	60 Rekening	221,067,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah rekening air, listrik dan telepon, internet,TV kabel yang terbayarkan	60 Rekening	157,200,000	
2	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	55 OB	300,000,000	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	55 OB	47,398,250	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	56 Jenis	165,375,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Alat Tulis Kantor	56 Jenis	50,000,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 dan 32.500 Jenis dan Lembar	82,687,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 dan 32.500 Jenis dan Lembar	10,965,550	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	5 Jenis	29,452,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	5 Jenis	500,000	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	100 Kotak dan 6 Jenis	34,650,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	100 Kotak dan 6 Jenis	6,000,000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer Tersedia	660 OB	596,246,000	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Tenaga Honorer Tersedia	660 OB	590,916,720	

Rancangan Awal RKP/ Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	6 Kali	100,000,000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	6 Kali	50,000,000	
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			812,250,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	30 Unit	275,625,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	250,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	20 Unit	86,625,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	
13	Pengadaan Mabeleur	Jumlah Mebeleur	8 Jenis	200,000,000	Pengadaan Mabeleur	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			467,500,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Peserta bimbingan teknis pertanahan dan penataan ruang	5 Kegiatan	467,500,000	Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat akuntabilitas kinerja	B LKjIP	253,275,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Tingkat akuntabilitas kinerja	B LKjIP	140,349,985	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	15 Laporan	28,275,000	Pengembangan data dan	Dinas	1. Jumlah Data Bidang	4 Bidang		

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	75,000,000	informasi	Pertanahan dan Penataan Ruang	2. Publikasi	2 kegiatan	70,349,985	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD yang dihasilkan	6 Dokumen	70,000,000	
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	cakupan tata tertib administrasi		2,539,787,000	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		Cakupan Tertib Administrasi Penguasaan Tanah	6/18 kecamatan 80/237 kel/desa	141,744,015	
	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah SKPT Yang Diterbitkan	18 Kecamatan	462,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1. Sanga-sanga 2. Marangkayu 3. Muara Badak 4. Anggana 5. Samboja 6. Muara Jawa		546 SKPT	141,744,015	
	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Sertifikat	5 Sertifikat	200,000,000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Sertifikat Tanah Masyarakat (PRODA)	Jumlah Bidang Tanah	100 bidang	200,000,000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah	12 Dokumen	991,875,000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian	Jumlah Bidang	20 Bidang	150,000,000	-	-	-	-	-	
	Penataan Data-data dan dokumen pertanahan	Jumlah Dokumen yang tertata	20 Dokumen	189,000,000	-	-	-	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi dan Izin Penetapan Lokasi	Izin Lokasi	20 Dokumen	181,912,000	-	-	-	-	-	
	Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis (Pra Sertifikasi)	Kelengkapan Berkas Sertifikat	1 Dokumen	165,000,000	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal RKP/ Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	persentase luas lahan bersertifikat		2,526,625,000	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Luas lahan aset daerah bersertifikat	8,70 Persen	5,700,000,000	
	Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah	Jumlah Persetujuan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan	30 PPT	529,000,000	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sertifikat Aset Pemda yang diproses	10 Sertifikat	200,000,000	
	Identifikasi Tata Guna Tanah	Jumlah Kecamatan yang diidentifikasi	2 Kecamatan	595,125,000	Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II	Tenggarong	Jumlah Lahan Yang dibebaskan	3,5 Ha	5,500,000,000	
	kompilasi Peta Sebaran Izin dengan Peta Hak Atas Tanah Perkebunan dan Industri (HGU, HGB)	Tersedianya data kompilasi Peta Sebaran Izin dengan Hak Atas Tanah Perkebunan dan Industri (HGU,HGB)	12 Peta Kompilasi	121,000,000	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Fasilitasi IP4T (Identifikasi Penguasaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah)	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi IP4T	18 Kecamatan	181,500,000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Konsolidasi Lahan	Jumlah Bidang yang dikonsolidasi	100 Bidang	750,000,000	-	-	-	-	-	
	Kompilasi Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	Jumlah Kecamatan yang memiliki Kompilasi peta penggunaan dan pemanfaatan lahan	18 Kecamatan	350,000,000	-	-	-	-	-	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	persentase penyelesaian kasus pertanahan		693,875,000	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase penyelesaian kasus tanah	75 Persen	325,000,000	
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah kasus yang diselesaikan	35 Kasus	231,000,000	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Loa Janan dan muara Kaman	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	2 Kecamatan	150,000,000	

Rancangan Awal RKP/ Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Fasilitasi Penyuluhan Administrasi Hukum Pertanahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan penyuluhan administrasi hukum Pertanahan	18 Kecamatan	462,875,000	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Muara Ritan Kec. Tabang	Jumlah kasus yang diselesaikan	14 Kasus	175,000,000	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			500,000,000	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
	Penyusunan Kajian Pandangan Suatu Masalah Pertanahan	Jumlah kajian yang dilakukan	1 Paket	250,000,000	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Draft Regulasi Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Draft Regulasi yang dikeluarkan	1 Dokumen	250,000,000	-	-	-	-	-	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki RDRT	Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang	12,750,000,000	Program Perencanaan Tata Ruang		1. Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang yang disusun 2. Tersediannya Dokumen RTRW dan 3. Persentase Kecamatan Yang Memiliki RDTR	2 Dokumen ada 11,1 % (2/18)	800,000,000	
	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	Tercapainya penyusunan dokumen Perda Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Revisi Perda RTRW Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200,000,000	
	Penyusunan RDTR Kawasan Delta Mahakam	Tersusunnya Dokumen RDTR Kawasan Delta Mahakam	1 Dokumen	1,200,000,000	Penyusunan RDTR IKK Kecamatan	Loa Kulu dan Tenggarong	Dokumen Substansi Perda RDTR Tenggarong	2 Dokumen	600,000,000	
	Penyusunan RTR Strategis Kawasan Kekembangan (Kenohan, Kembang Janggut, Tabang)	Tersusunnya Materi Teknis RTR Strategis Kawasan Kekembangan	1 Dokumen	1,200,000,000	-	-	-	-	-	
	Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Loa Kulu	Tersusunnya Dokumen RDTR IKK Kecamatan	1 Dokumen	900,000,000	-	-	-	-	-	
	Lanjutan Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Tenggarong	Tersusunnya Dokumen RDTR IKK Kecamatan	1 Dokumen	500,000,000	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal RKP/ Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Lanjutan Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Tenggarong Seberang	Tersusunnya Dokumen RDTR IKK Kecamatan	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan KLHS RDTR IKK Kecamatan Tenggarong	Tersusunnya Dokumen RDTR IKK Kecamatan	1 Dokumen	600,000,000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Loa Kulu	Tersusunnya materi KLHS RDTR Loa Kulu	1 Dokumen	450,000,000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan KLHS RDTR IKK Kecamatan Tenggarong Seberang	Tersusunnya Dokumen RDTR IKK Kecamatan	1 Dokumen	600,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Kota Bangun	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Kota Bangun dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Muara Kaman	mendapatkan persetujuan substansi RDTR Muara Kaman dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Muara Muntai	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Muara Muntai dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Muara Wis	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Muara Wis dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Sebulu	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Sebulu dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Kenohan	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Kenohan dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan BKPRN - Persetujuan Substansi RDTR Kembang Janggut	Mendapatkan persetujuan substansi RDTR Kembang Janggut dari BKPRN	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	-
	Konsultasi Publik dan Rekomendasi Gubernur RDTR Loa Kulu	Terlaksananya konsultasi publik dan rekomendasi gubernur	2 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Tenggarong	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Tenggarong	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Tenggarong Seberang	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Tenggarong Seberang	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-

Rancangan Awal RKP/ Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Loa Janan	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Loa Janan	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Muara Jawa	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Muara Jawa	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Sanga-sanga	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Sanga-sanga	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Samboja	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Samboja	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Anggana	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Anggana	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Marangkayu	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Marangkayu	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Muara Badak	Terlaksananya legalisasi Perda RDTR Muara Badak	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan legalisasi Perda RDTR Tabang	terlaksananya legalisasi Perda RDTR Tabang	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk utilitas terpadu Kota	Tersusunnya studi kelayakan pemanfaatan ruang bawah tanah untuk utilitas terpadu Kota Tenggara	1 Dokumen	800,000,000	-	-	-	-	-	
	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan RDTR		3,706,375,000	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Penunjang Sistem Perpetaan dan Koreksi Lapangan	Tersedianya peta pendukung terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang	1 Dokumen	606,375,000	-	-	-	-	-	
	Identifikasi Ijin Pemanfaatan Ruang	mendapatkan data-data ijin pemanfaatan ruang per kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen	250,000,000	-	-	-	-	-	
	Updating Tata Guna Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara	mendapatkan data tata guna lahan terupdate setiap tahun dan perubahan/deviasi terhadap rencana tata ruang yang sudah ditetapkan (Dokumen)	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Verifikasi Keterangan Pemanfaatan Ruang	terbentuknya SIM yang bisa mempercepat pelayanan publik (Dokumen)	1 Dokumen	500,000,000	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Bidang Tata Ruang	Peningkatan kapabilitas kemampuan dan pengetahuan aparat tata ruang (Orang)	12 Orang	200,000,000	-	-	-	-	-	
	Pendampingan kegiatan Bidang Tata Ruang	terkoordinasinya kegiatan tata ruang daerah dengan propinsi dan pusat (Dokumen)	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	
	Monitoring implementasi peraturan daerah dalam RDTR	terlaksananya monitoring penerapan perda RDTR (Dokumen)	1 Dokumen	500,000,000	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Tata Ruang	Terlaksananya sosialisasi mengenai tata ruang terhadap aparat dan masyarakat (Kegiatan)	1 Dokumen	500,000,000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi biaya penelitian tata ruang yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara	terlaksananya fasilitasi penelitian mahasiswa perguruan tinggi di kabupaten kutai kartanegara (Dokumen)	1 Dokumen	400,000,000	-	-	-	-	-	
	Pembuatan sayembara perkembangan kota (tempo dulu - sekarang) wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	terlaksananya sayembara perkembangan kota yang masih terdokumentasi (Kegiatan)	1 Kegiatan	200,000,000	-	-	-	-	-	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	ruang yang berubah peruntukannya		5,066,500,000	-	-	-	-	-	
	Penyusunan dan Penetapan Garis Sepadan Jalan, Garis Sepadan Bangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	ditetapkan GSJ dan GSB (Dokumen)	1 Dokumen	600,000,000	-	-	-	-	-	
	Identifikasi Ijin Pemanfaatan dan pelanggaran Tata Ruang	Jumlah dokumen terhadap Pemanfaatan serta Pelanggaran yang dilakukan terhadap penataan ruang (Dokumen)	1 Dokumen	346,500,000	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
	Kajian Insentif dan Disinsentif Terhadap Ketentuan Tata Bangunan	Tersusunnya Kajian Insentif dan Disinsentif Terhadap Ketentuan Tata Bangunan (Dokumen)	1 Dokumen	660,000,000	-	-	-	-	-	
	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan (Dokumen)	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Pelayanan Survey Lapangan verifikasi Izin Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pelayanan Survey Lapangan verifikasi Izin Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan (Berkas)	1 Kegiatan	330,000,000	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Paket)	1 Paket	330,000,000	-	-	-	-	-	
	Pengawasan dan Pengendalian dan Korektif Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian dan Perbaikan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Pedoman Pelestarian Bangunan Pusaka Bagi Pemilik Rumah	Tersusunnya Pedoman Pelestarian Bangunan Pusaka Bagi Pemilik Rumah (Dokumen)	1 Dokumen	700,000,000	-	-	-	-	-	
	pembuatan informasi tanda batas GSB dan GSJ per koridor jalan wilayah 2 Bagian wilayah perkotaan	terlaksananya pemasangan informasi tanda batas GSB dan GSJ (Kegiatan)	1 Kegiatan	300,000,000	-	-	-	-	-	
	pengenalan tata ruang pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya pengenalan tata ruang di tingkat SD (Kegiatan)	1 Kegiatan	400,000,000	-	-	-	-	-	
	pengenalan tata ruang pada tingkat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	terlaksananya pengenalan tata ruang di tingkat SLTP (Kegiatan)	1 Kegiatan	400,000,000	-	-	-	-	-	
	pengenalan tata ruang pada tingkat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Utama	terlaksananya pengenalan tata ruang di tingkat SLTA (Kegiatan)	1 Kegiatan	400,000,000	-	-	-	-	-	

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	-	-	-	-
2	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Pemukiman	Desa Muara Ritan, Tabang	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	1 Kasus	Program/Kegiatan dari pemangku kepentingan ini digabungkan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, sehingga tidak menambah item kegiatan hanya target capaian kinerjanya saja yang ditambah menjadi 14 kasus dari target awal 13 kasus
3	-	-	-	-	-

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA DAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2019					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100%	912,980,520				1,625,344,220
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	60 Rekening	157,200,000	APBD		60 Rekening	232,120,000
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	55 OB	47,398,250	APBD		1 Paket	300,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	56 Jenis	50,000,000	APBD		660 OB	173,640,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 dan 32.500 Jenis dan Lembar	10,965,550	APBD		1 Paket	111,360,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Jenis	500,000	APBD		30 Unit	30,925,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Kotak dan 6 Jenis	6,000,000	APBD		1 Paket	36,382,500
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	660 OB	590,916,720	APBD		100 Jenis	590,916,720
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Kali	50,000,000	APBD		85 Jenis	150,000,000

